

**SISTEM PEMIDANAAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG
EKSPOR IMPOR DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Hukum**

Konsentrasi : Pidana Ekonomi



Disusun Oleh :

BAYU PURNOMO SETYAWAN
NIM. S331208002

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

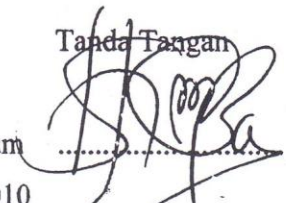

commit to user
2014

**SISTEM PEMIDANAAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG
EKSPOR IMPOR DI INDONESIA**

Disusun Oleh


BAYU PURNOMO SETYAWAN
NIM. S331208002

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing	Prof. Supanto, SH, M.Hum NIP. 196011071986011010		15/okt-'14
Co Pembimbing	Rofikah, SH, MH NIP. 195512121983032001		20/ 2014. / 10

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH
NIP. 19630209 1988031003





commit to user

**SISTEM PEMIDANAAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR
IMPOR DI INDONESIA**

Disusun Oleh

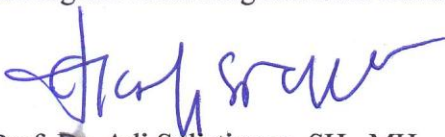
**BAYU PURNOMO SETYAWAN
NIM. S331208002**

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH NIP. 19630209 1988031003		
Sekretaris	Prof. Supanto, SH, M.Hum NIP. 196011071986011010		
Anggota 1.	Rofikah, SH., MH NIP. 195512121983032001		
2.	Moch. Najib Imanullah, S.H.,MH.,Ph NIP. 195908031985031001		

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH
NIP. 19630209 1988031003

PERNYATAAN

Nama : BAYU PURNOMO SETYAWAN

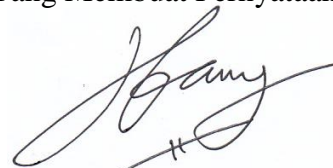
NIM : S331208002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : Sistem Pemidanaan Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Di Indonesia, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-*upload* atau dipublikasikan website Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, Oktober 2014

Yang Membuat Pernyataan



BAYU PURNOMO SETYAWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya sehingga tesis dengan judul **”SISTEM PEMIDANAAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR IMPOR DI INDONESIA”** ini dapat penulis selesaikan tepat waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh dalam rangkaian kurikulum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam menempuh jenjang keserjanaan S2.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ilmiah ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Prof. Hartiwiningsih, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, SH, MH, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Prof. Supanto, SH, M.Hum, Selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya tesis ini.

commit to user

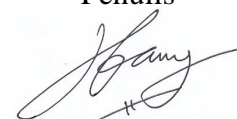
6. Rofikah, SH, MH., selaku Pembimbing Pendamping II yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, dorongan dan pengarahan sehingga penyusunan tesis ini terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
8. Bapak dan Ibu staf Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih informasi dan dukungannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
10. Keluarga besarku tersayang, dengan dorongan dan kasih sayang sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan cepat.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal budi baik yang disumbangkan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ilmiah ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Surakarta, Oktober 2014

Penulis



commit to us BAYU PURNOMO SETYAWAN

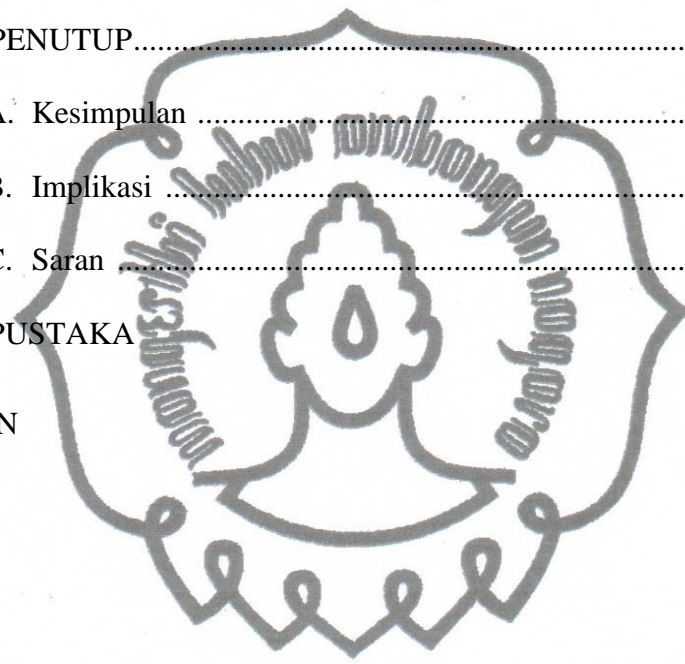
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Sistem Pidana	15
B. Kebijakan Hukum Pidana	17
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	17
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana	19
3. Teori Pidana	20
4. Teori Hans Kelsen tentang Hukum	23

commit to user

C. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Perundang-undangan di Bidang Ekonomi	29
D. Tindak Pidana Penyelundupan	33
E. Jenis-jenis Tindak Pidana Penyelundupan	36
F. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan	38
G. Tindak Pidana Penyelundupan dalam kegiatan Ekspor-Import.....	40
H. Jenis-jenis Tindak Pidana Kepabeanan	41
I. Sanksi Pidana	44
J. Ketentuan Acara	45
K. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia.....	46
L. Penelitian yang relevan.....	51
M. Kerangka Berfikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	56
C. Cara Pengumpulan Data	57
D. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian.....	58
1. Formulasi hukum tindak pidana penyelundupan barang ekspor-impur dalam perundang-undangan di Indonesia	58

2. Kriteria Pelanggaran Administrasi ekspor-impor dijadikan sebagai tindak pidana penyelundupan	71
3. Alasan Kriminalisasi tindak pidana penyelundupan barang ekspor impor di Indonesia menggunakan sanksi pidana	89
B. Pembahasan	108
BAB V PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan	161
B. Implikasi	164
C. Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Terdakwa, Sanksi, Denda dan Peraturan yang digunakan 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran	53
Gambar 2. Alur Penyelidikan Perkara Penyelundupan oleh Bea Cukai	83



ABSTRAK

Bayu Purnomo Setyawan, Sistem Pemidanaan Perundang-Undangan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Di Indonesia. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini untuk mengetahui 1) formulasi hukum tindak pidana penyelundupan barang ekspor-ekspor dalam perundang-undangan di Indonesia, 2) kriteria pelanggaran administrasi eksport-import sehingga dijadikan sebagai tindak pidana penyelundupan, dan 3) cara menggulangi tindak pidana penyelundupan barang ekspor import di Indonesia menggunakan sanksi pidana.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena meneliti peraturan perundangan yang berhubungan dengan kepabeanan yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang - Undang Nomor 7/Drt/1955, KUHP, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Cara pengambilan data dengan dokumentasi dan studi pustaka yang menggunakan jenis dan sumber data diambil dengan data hukum primer, sekunder dan tertier kemudian dilakukan analisis dengan logika deduktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Formulasi hukum tindak pidana penyelundupan barang ekspor-impor dalam perundang-undangan di Indonesia terkait dengan penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berarti perbuatan tersebut dilarang, sepatutnya diberi sanksi pidana. Pelanggaran undang-undang di bidang ekonomi khususnya penyelundupan, keterkaitan undang-undang yang satu dengan undang-undang lain merupakan bagian penting dalam menentukan formulasi undang-undang yang tepat. UU No.17 Tahun 2006 telah mengatur tentang undang-undang kepabeanan tidak berjalan secara maksimal jika tidak dilakukan kajian tentang undang-undang atau peraturan lain. 2) sebagai dasar sebagai dasar mengidentifikasi seseorang dikatakan sebagai penyelundup sebagai berikut : penyelundupan harus memenuhi tiga kriteria atau ketentuan pokok yaitu kesengajaan, tidak memenuhi ketentuan UU, dan harus ada pelakunya, 3) Dalam Undang-Undang Kepabeanan yang baru (UU No. 17 Tahun 2006), terjadi perubahan norma pengertian penyelundupan. Jika dalam UU Pabean yang lama pengertian penyelundupan hanya jika sama sekali tidak memenuhi ketentuan, maka dalam UU baru diuraikan menjadi 13 norma yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan impor dan ekspor.

Kata kunci : Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana, Penyelundupan, Ekspor, Impor.

ABSTRACT

Bayu Purnomo Setyawan, Punishment System Of Criminal Legislation In Tackling The Crime Of Smuggling Of Goods Import Export In Indonesian. Thesis. Master Program of Law, Faculty of Law, Sebelas Maret Surakarta University.

This research is to know 1) formulation of the law of criminal offence the smuggling of goods export import in legislation in Indonesian, 2) administrative offence criteria export – import so as to serve as a criminal offence the smuggling, and 3) how to menggulangi a criminal offence the smuggling of goods export import in Indonesia to use criminal sanctions.

This research study examined the use of normative legal regulations as related to the Customs Act No. 17 of 2006 on customs, law number 7/Drt/1955, of the Criminal Code, and other related regulations. How data retrieval with the documentation and study of the library using the type and source of data taken with the primary law, secondary data and then do analysis ertier with deductive logic.

Research results can be concluded that 1) formulation of the law of the import-export goods smuggling a criminal offence in the legislation in Indonesia related to the determination of an act as a crime means the Act prohibited, should be given criminal sanctions. Violation of laws in the economic sphere, especially smuggling, how one act with other legislation is an important part in determining the formulation of appropriate legislation. Law No. 17 of 2006 have set lawdoes not run optimally if not performed a review of the legislation or other regulations. 2) as basic as basic mengidentifikasikan someone said to be a smuggler as follows: smuggling must satisfy three basic criteria orconditions which are deliberate, does not meet the provisions of the Act, and there should be a culprit, 3) in the Customs legislation that recently (Law No. 17of 2006), changing the norms of smuggling notions. If in the Act of smuggling notions of the old Customsonly if it does not comply with the provisions of the new Act, then in the elaborated into 13 norm that can be smuggling import and export.

Key words: Punishment System, Crime, Smuggling, export, import